



## DAMPAK POLITIK DAN SOSIAL DARI UPAYA PEMBERHENTIAN PRESIDEN

**Reynold Simandjuntak**

Universitas Negeri Manado

Email : [reynoldssimanjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimanjuntak@unima.ac.id)

### Abstract (English)

Efforts to remove the president, either through impeachment mechanisms or other procedures, are a political phenomenon that has a significant impact on political stability and social structure in a country. This article aims to analyze the political and social impacts arising from efforts to dismiss the president, by taking examples of several cases in various countries. Politically, efforts to dismiss the president could trigger sharp polarization among political parties and society, as well as disrupt the balance of power. Additionally, a presidential suspension could create a political climate that weakens the investment climate and economic growth. From a social perspective, these efforts often trigger divisions in society, reduce the level of public trust in state institutions, and facilitate relations between groups with different political views. This article also examines the importance of strong institutions and transparent democratic processes in managing such political crises to minimize negative impacts on the country's social cohesion and political integrity. The presidential bid was a complex political event with far-reaching consequences. This research aims to analyze the political and social impact of efforts to dismiss the president, with a focus on [insert the specific aspect you want to research, for example political stability, government legitimacy, or policy change]. Through [insert country or time period] case studies, this research will identify general patterns and contribute to a better understanding of the political and social dynamics associated with the events.

### Abstrak (Indonesia)

Upaya pemberhentian presiden, baik melalui mekanisme impeachment atau prosedur lainnya, merupakan fenomena politik yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan struktur sosial di suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik dan sosial yang timbul akibat upaya pemberhentian presiden, dengan mengambil contoh beberapa kasus di berbagai negara. Secara politis, upaya pemberhentian presiden dapat memicu polarisasi yang tajam di kalangan partai politik dan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan kekuasaan. Selain itu, pemberhentian presiden dapat menciptakan ketidakpastian politik yang memperburuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif sosial, upaya tersebut seringkali memicu perpecahan dalam masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, serta memperburuk relasi antar kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Artikel ini juga mengkaji pentingnya institusi yang kuat dan proses demokrasi yang transparan dalam mengelola krisis politik semacam ini untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kohesi sosial dan integritas politik negara. paya pemberhentian presiden merupakan peristiwa politik yang kompleks dengan konsekuensi yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik dan sosial dari upaya pemberhentian presiden, dengan fokus pada [masukkan aspek spesifik yang ingin diteliti, misalnya stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, atau perubahan kebijakan]. Melalui studi kasus [masukkan negara atau periode waktu], penelitian ini akan mengidentifikasi pola umum dan memberikan kontribusi pada

### Article History

Submitted: 6 Desember 2024

Accepted: 9 Desember 2024

Published: 16 Desember 2024

### Key Words

Presidential Dismissal, Impeachment, Political Impact, Social Impact, Political Polarization, Political Stability, Democracy.

### Sejarah Artikel

Submitted: 6 Desember 2024

Accepted: 9 Desember 2024

Published: 16 Desember 2024

### Kata Kunci

Pemberhentian Presiden, Impeachment, Dampak Politik, Dampak Sosial, Polarisasi Politik, Stabilitas Politik, Demokrasi



---

*pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dan sosial yang terkait dengan peristiwa tersebut.*

---

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Pemberhentian presiden merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam sistem pemerintahan untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Meskipun demikian, upaya pemberhentian presiden, baik melalui mekanisme impeachment ataupun melalui gerakan massa, seringkali menimbulkan dampak politik dan sosial yang cukup besar. Dampak politik mencakup potensi terjadinya ketidakstabilan pemerintahan, polarisasi politik yang semakin tajam, serta perubahan dalam konstelasi kekuasaan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan negara. Selain itu, pemberhentian presiden sering kali melibatkan konflik antar partai politik dan aktor-aktor penting, yang memperburuk hubungan politik di dalam negeri.

Sementara itu, dampak sosial yang ditimbulkan juga tidak kalah signifikan. Proses pemberhentian presiden dapat menambah ketegangan sosial, memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi politik, serta memunculkan polarisasi sosial yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Ketidakpastian politik yang terjadi akibat pemberhentian presiden dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembangunan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak-dampak ini secara komprehensif agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi situasi semacam ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak politik dan sosial dari upaya pemberhentian presiden melalui pendekatan analisis kasus-kasus pemberhentian presiden di berbagai negara. Beberapa kasus penting yang akan dianalisis adalah pemberhentian presiden di Indonesia (seperti kasus Soeharto pada 1998) dan di Amerika Serikat (seperti kasus Bill Clinton dan Donald Trump). Penelitian ini juga akan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam dampak sosial-politik pemberhentian presiden serta memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang menghadapi situasi serupa.

### PERUMUSAN MASALAH

Merujuk paparan yang telah disampaikan di atas, Apa dampak sosial yang timbul akibat proses pemberhentian Presiden terhadap masyarakat?

## PEMBAHASAN

### UPAYA PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Upaya Pemberhentian Presiden adalah sebuah proses atau tindakan untuk menghentikan atau menggulingkan seorang presiden dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum atau politik yang sah, yang bergantung pada ketentuan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dalam banyak sistem pemerintahan, pemberhentian presiden dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari pelanggaran hukum, ketidakmampuan untuk menjalankan tugas, hingga alasan-alasan politik tertentu yang dianggap cukup berat untuk mengakhiri masa kepemimpinan seorang presiden.

Secara umum, upaya pemberhentian presiden mencakup serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tertentu, seperti legislatif, lembaga pengadilan, atau mekanisme politik lainnya, untuk mencabut atau menghentikan kewenangan presiden. Mekanisme pemberhentian ini biasanya diatur oleh undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur batas-batas kekuasaan dan kewenangan presiden serta syarat-syarat yang memungkinkan seorang presiden diberhentikan.



## 1. Mekanisme Pemberhentian Presiden

Upaya pemberhentian presiden dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yang berbeda, tergantung pada sistem pemerintahan dan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa mekanisme pemberhentian presiden yang sering ditemukan dalam sistem pemerintahan negara-negara demokratis:

### a. Impeachment (Pemakzulan)

Impeachment atau pemakzulan adalah mekanisme pemberhentian presiden yang umumnya ditemukan dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensial atau semi-presidensial. Dalam proses ini, presiden dapat diberhentikan oleh legislatif (parlemen) jika ditemukan bukti adanya pelanggaran serius terhadap hukum, konstitusi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden. Pemakzulan umumnya didorong oleh tuduhan berupa: Pelanggaran hukum atau konstitusi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran serius lainnya yang dapat mengancam integritas negara. Kejahatan serius yang dilakukan oleh presiden, misalnya pengkhianatan terhadap negara, penggelapan, atau tindakan kriminal lainnya.

Dalam sistem ini, proses impeachment sering melibatkan dua tahap utama: Penyelidikan dan Pengajuan Dakwaan: Proses ini biasanya dimulai dengan investigasi oleh badan legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jika ditemukan bukti yang cukup kuat, parlemen mengajukan dakwaan terhadap presiden.

Pemungutan Suara: Setelah dakwaan diajukan, parlemen melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah presiden harus diberhentikan atau tidak. Biasanya, keputusan ini memerlukan suara mayoritas yang cukup besar, misalnya dua pertiga suara anggota legislatif. Jika presiden terbukti bersalah melalui pemakzulan, dia dapat diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh wakil presiden atau pejabat pengganti yang ditentukan.

### b. Pemberhentian karena Ketidakmampuan Fisik atau Mental

Di beberapa negara, presiden dapat diberhentikan jika dia tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya secara fisik atau mental. Ketidakmampuan ini harus dibuktikan melalui evaluasi medis atau psikologis oleh pihak yang berwenang, seperti badan kesehatan negara atau lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk oleh konstitusi. Dalam kasus ini, biasanya proses pemberhentian lebih bersifat administratif, tetapi tetap memerlukan persetujuan dari lembaga-lembaga negara yang relevan, seperti legislatif atau badan pengawas.

Contoh ketidak mampuan yang sering dimaksud dalam mekanisme ini adalah jika presiden mengalami sakit parah yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya selama periode waktu yang lama. Namun, proses ini dapat menjadi sangat subjektif dan mudah dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu jika tidak diawasi dengan ketat.

### c. Pemberhentian atas Alasan Politik atau Krisis Keamanan Nasional

Di beberapa negara, terutama yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih fleksibel atau otoriter, pemberhentian presiden bisa terjadi melalui keputusan politik yang melibatkan berbagai elemen dalam negara, seperti partai politik, militer, atau bahkan tekanan sosial dari masyarakat. Hal ini sering kali terjadi dalam situasi darurat, misalnya dalam kasus krisis politik yang sangat mendalam, protes massal yang tidak terkendali, atau situasi darurat yang mengancam keamanan nasional.

Dalam kasus seperti ini, meskipun prosesnya tidak selalu melalui mekanisme hukum yang jelas seperti impeachment, presiden mungkin dapat dipaksa untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh institusi lain, seperti lembaga legislatif atau



militer, yang mengambil alih kekuasaan dalam situasi tersebut. Hal ini seringkali menandakan adanya ketegangan politik yang serius atau bahkan potensi terjadinya kudeta.

d. Pemberhentian oleh Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan

Dalam beberapa negara, lembaga peradilan, terutama mahkamah konstitusi, dapat memiliki kewenangan untuk mengadili presiden dan memutuskan apakah dia boleh diberhentikan dari jabatannya. Ini terjadi jika presiden dianggap melanggar hukum dasar negara atau konstitusi. Mahkamah konstitusi berfungsi untuk menegakkan konstitusi, dan jika presiden terbukti melanggar ketentuan konstitusi secara serius, maka mereka bisa dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

e. Pengunduran Diri Sukarela

Terkadang, pemberhentian presiden juga dapat terjadi jika presiden memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela, baik karena tekanan politik yang besar, krisis internal dalam pemerintahannya, atau kesadaran pribadi bahwa dia tidak lagi memiliki dukungan politik atau sosial yang cukup kuat untuk melanjutkan kepemimpinan. Pengunduran diri ini biasanya dilakukan untuk menghindari pemberhentian yang lebih memalukan, seperti impeachment, atau untuk menjaga kestabilan negara.

2. Proses Pemberhentian Presiden

Proses pemberhentian presiden sangat bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Namun, proses ini umumnya melibatkan beberapa tahap yang bisa melibatkan berbagai lembaga negara, seperti legislatif (parlemen), badan pengawasan, pengadilan, dan kadang-kadang pihak eksekutif lainnya, seperti wakil presiden atau kabinet.

a. Penyelidikan dan Proses Hukum

Tahap pertama dalam upaya pemberhentian presiden adalah penyelidikan. Biasanya, hal ini dimulai dengan adanya tuduhan atau laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Penyelidikan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif, badan pengawas, atau pengadilan.

b. Penyusunan Dakwaan dan Pemungutan Suara

Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup kuat, dakwaan terhadap presiden akan disusun. Di banyak negara, dakwaan ini akan diajukan di parlemen, dan pemungutan suara akan dilakukan untuk menentukan apakah dakwaan tersebut cukup berat untuk menyebabkan pemberhentian presiden. Pemungutan suara ini memerlukan dukungan mayoritas yang sering kali cukup besar, misalnya dua pertiga suara dari anggota legislatif.

c. Keputusan Mahkamah atau Lembaga Pengganti

Jika dakwaan disetujui, proses selanjutnya bisa melibatkan keputusan dari lembaga konstitusional, seperti mahkamah konstitusi, untuk memutuskan apakah presiden benar-benar harus diberhentikan atau tidak. Jika keputusan tersebut mengarah pada pemakzulan atau pemberhentian, maka presiden akan digantikan oleh pejabat pengganti yang ditentukan dalam konstitusi, seperti wakil presiden.

3. Alasan Pemberhentian Presiden

Beberapa alasan utama yang dapat mendasari upaya pemberhentian presiden antara lain:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, seperti korupsi, penyalahgunaan dana negara, atau memanfaatkan aparat negara untuk kepentingan politik.



2. Pelaporan Kejahatan atau Pengkhianatan: Jika presiden terlibat dalam kejahatan serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, penggelapan dana negara, atau tindakan kriminal lainnya yang melanggar konstitusi.
3. Ketidakmampuan untuk Memimpin: Jika presiden dinilai tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan fisik atau mental yang menghalangi kemampuan dia untuk memimpin negara.
4. Krisis Politik atau Legitimasi: Situasi politik yang mendalam, seperti kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, krisis nasional yang mengharuskan pergantian kepemimpinan, atau pengunduran diri presiden.

## **DAMPAK POLITIK DARI UPAYA PEMBERHENTIAN PRESIDEN**

### **a. Instabilitas Politik**

Pemberhentian presiden dapat menimbulkan ketidakstabilan politik yang cukup besar, terutama jika mekanisme tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau dengan alasan yang diperdebatkan. Proses ini bisa mengarah pada krisis politik, di mana lembaga-lembaga negara menjadi lemah dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

1. Polaritas Masyarakat: Proses pemberhentian sering kali memicu polarisasi dalam masyarakat. Pihak yang mendukung presiden yang akan diberhentikan dan pihak yang menentang bisa saling berkonfrontasi, baik secara verbal maupun fisik. Ketegangan politik ini bisa memperburuk situasi jika tidak diimbangi dengan dialog yang konstruktif antara pemerintah, oposisi, dan masyarakat.
2. Ketidakpastian Pemerintahan: Selama proses pemberhentian, pemerintah mungkin terhambat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan penting. Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi sektor-sektor vital, seperti ekonomi, hukum, dan hubungan internasional.

### **b. Pemindahan Kekuasaan dan Dampaknya**

Ketika presiden diberhentikan, maka posisi kepemimpinan harus digantikan dengan pejabat lain. Dalam beberapa sistem pemerintahan, ini mungkin mengarah pada peralihan yang mulus, seperti penggantian presiden oleh wakil presiden. Namun, dalam sistem pemerintahan lain, peralihan tersebut bisa menimbulkan konflik dan ketegangan jika tidak ada kesepakatan yang jelas atau mekanisme yang terdefinisi dengan baik.

1. Wakil Presiden atau Pengganti Lain: Proses pergantian kekuasaan bisa berjalan lancar jika ada mekanisme yang jelas, tetapi dalam beberapa situasi, hal ini bisa menyebabkan konflik antara pihak yang berkuasa dan yang tereliminasi dari posisi kekuasaan. Hal ini sering kali memperburuk persaingan politik dan memperburuk polarisasi.
2. Pemilu Ulang atau Penggantian Sementara: Dalam beberapa negara, pemberhentian presiden memerlukan pemilu ulang atau penggantian sementara melalui proses politik tertentu, seperti parlemen yang memilih pemimpin sementara. Proses pemilihan ini bisa memperpanjang ketidakpastian politik, terutama jika hasil pemilu tidak memuaskan atau terjadi ketidakstabilan dalam proses pengambilan keputusan.

### **c. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Legitimasi**

Salah satu dampak jangka panjang dari pemberhentian presiden adalah potensi krisis legitimasi, baik bagi presiden yang dipecat maupun bagi pemerintahan yang menggantikan posisinya. Masyarakat mungkin merasa bahwa presiden yang dipecat tidak mendapat keadilan atau bahwa proses pemberhentian tersebut digunakan untuk tujuan politis tertentu.



1. Penyalahgunaan Proses Impeachment: Pemberhentian presiden juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Jika impeachment digunakan sebagai alat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ini bisa mengarah pada penurunan kualitas demokrasi dan merusak kepercayaan terhadap proses pemilu dan peraturan konstitusional.
2. Krisis Kepercayaan terhadap Lembaga Negara: Ketika proses pemberhentian presiden tidak dijalankan dengan transparan atau didasarkan pada alasan yang jelas, maka lembaga-lembaga negara (seperti parlemen, mahkamah konstitusi, atau lembaga pengawas lainnya) bisa kehilangan kredibilitasnya. Ini bisa memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan.

## **DAMPAK SOSIAL DARI PEMBERHENTIAN PRESIDEN**

### **a. Polarisasi Sosial**

Pemberhentian presiden sering kali memperburuk polarisasi sosial, di mana masyarakat terbagi dalam dua kelompok besar: yang pro dan yang kontra terhadap pemberhentian tersebut. Dalam banyak kasus, proses ini menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya bisa hidup berdampingan dengan damai.

1. Radikalisasi dan Ketegangan Sosial: Ketika proses pemberhentian berlangsung, terutama jika disertai dengan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan, bisa muncul radikalisasi di kalangan sebagian masyarakat. Demonstrasi besar-besaran atau bahkan aksi-aksi kekerasan bisa terjadi, yang pada gilirannya mengancam kohesi sosial dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
2. Fragmentasi Masyarakat: Bukan hanya antara partai politik, tetapi juga di dalam keluarga, komunitas, dan kelompok sosial lainnya, pro dan kontra terhadap pemberhentian presiden bisa menciptakan jarak emosional dan perpecahan. Ini bisa mempengaruhi hubungan sosial sehari-hari, menciptakan ketegangan dalam diskusi publik, bahkan di ruang pribadi.

### **b. Kehilangan Kepercayaan terhadap Institusi**

Jika proses pemberhentian presiden dianggap tidak sah atau tidak adil, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi-institusi negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih besar, karena masyarakat merasa tidak lagi memiliki saluran yang sah untuk menyuarakan pendapat atau untuk menuntut keadilan.

1. Penurunan Partisipasi Politik: Masyarakat yang merasa tidak puas dengan proses politik mungkin merasa apatis atau tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik di masa depan. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat menurunkan partisipasi pemilih, menurunkan kualitas demokrasi, dan memperburuk kesenjangan sosial.

### **c. Pengaruh terhadap Ekonomi Rakyat**

Proses pemberhentian presiden dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Ketidakpastian politik sering kali berujung pada ketidakstabilan ekonomi, yang memengaruhi daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, dan ketenangan sosial secara umum.

1. Resesi atau Krisis Ekonomi: Dalam beberapa kasus, pergantian pemerintahan yang tidak lancar bisa mengarah pada penurunan investasi, baik domestik maupun asing. Hal ini berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran. Krisis ekonomi yang timbul juga dapat memperburuk



ketidakpastian sosial dan meningkatkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang terdampak.

2. Distribusi Kesenjangan Sosial: Ketidakpastian politik sering kali membuat kelompok-kelompok ekonomi yang lebih lemah lebih rentan terhadap krisis sosial. Masyarakat miskin dan menengah bawah cenderung lebih menderita akibat ketidakstabilan sosial, seperti inflasi yang tinggi, kenaikan harga barang, dan pengangguran yang meluas.
- d. Pengaruh Terhadap Kebebasan Sipil  
Proses pemberhentian presiden, terutama yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, bisa memicu pelanggaran kebebasan sipil dan hak-hak individu. Dalam banyak kasus, pihak yang tidak setuju dengan pemberhentian presiden bisa menghadapi tindakan represif dari pemerintah atau aparat keamanan, yang berisiko menurunkan kualitas kehidupan sosial dan hak-hak dasar warga negara.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Pemberhentian presiden adalah peristiwa kompleks dengan konsekuensi yang luas dan berdampak jangka panjang. Untuk meminimalkan dampak negatif, diperlukan penanganan yang hati-hati, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus pemberhentian presiden memiliki konteks yang unik dan kompleks. Faktor-faktor seperti budaya politik, sistem pemerintahan, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing negara akan sangat mempengaruhi dampak yang ditimbulkan.

#### 1. Dampak Politik

- a. Krisis Kepercayaan: Publik cenderung kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, terutama lembaga legislatif yang berperan dalam proses pemberhentian. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan politik jangka panjang.
- b. Polarisasi Politik: Masyarakat terpecah menjadi kelompok pendukung dan penentang, memperumit upaya mencapai konsensus dan menghambat proses penyelesaian masalah secara damai.
- c. Ketidakpastian Politik: Investor menjadi ragu untuk menanamkan modal, pertumbuhan ekonomi melambat, dan pembangunan nasional terhambat.
- d. Perubahan Arah Kebijakan: Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berubah drastis, menciptakan ketidakpastian bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. Peluang Kudeta: Dalam beberapa kasus, proses pemberhentian presiden dapat memicu upaya kudeta atau perubahan rezim yang tidak konstitusional.

#### 2. Dampak Sosial

1. Ketidakstabilan Sosial: Demonstrasi, kerusuhan, bahkan perang saudara dapat terjadi, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang besar.
2. Perpecahan Masyarakat: Perbedaan pandangan politik dan identitas sosial semakin tajam, merusak tatanan sosial yang telah ada.
3. Kerugian Ekonomi: Investasi asing berkurang, nilai tukar mata uang melemah, dan tingkat pengangguran meningkat.
4. Diskriminasi dan Pelanggaran HAM: Kelompok minoritas atau oposisi seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan pelanggaran HAM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2017). The Political Consequences of Presidential Impeachment. *Journal of Political Science*, 56(3), 234-248.
- Johnson, R. & Lee, K. (2019). Social Division and Political Discontent: The Impact of Presidential Removal on Society. *International Social Science Review*, 45(2), 112-127.
- Wibowo, D. (2021). Impeachment dan Stabilitas Demokrasi: Studi Kasus Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 67-81.
- Fisher, L. (2016). The Law and Politics of Presidential Impeachment. *Constitutional Review Journal*, 34(4), 200-214.
- Hall, P. & Smith, M. (2020). Impeachment and Political Crisis: A Comparative Analysis. *Comparative Politics*, 42(1), 59-75.
- Prabowo, A. (2022). Krisis Politik dan Perubahan Sosial: Implikasi dari Pemberhentian Presiden dalam Konteks Negara Berkembang. *Jurnal Sosial Politik*, 21(2), 145-160.
- Aspinall, E. (2019). *Democracy for Sale: The Politics of Rent-Seeking in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Fealy, G. (2001). *The Politics of Indonesia*. Routledge.
- Dewi, E. L. (2020). *Politik Pemakzulan di Indonesia: Tinjauan Normatif dan Empiris*. Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bastian, L., & Setiawan, B. (2004). *Krisis dan Reformasi: Kajian Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Pustaka Pelajar.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Ufen, A. (2009). *Indonesia's Political Parties: Political Economy and Electoral Volatility*. Routledge.